

## DISTRIBUSI ANGGARAN YANG TIDAK MERATA SEBAGAI SALAH SATU PENYEBAB KEMISKINAN DI JAWA BARAT

Heni Rohaeni

ASM BSI Bandung, [heni.hri@bsi.ac.id](mailto:heni.hri@bsi.ac.id)

**Abstract**-Poverty is a chore that must be immediately addressed so that the effects of poverty does not cause problems increasingly complex again. Lots of programs or policies that were created by the government to tackle problems of poverty, but only government that has a mature concept and is supported by major funding sources that would be able to solve the problem of poverty. Besides poverty can be overcome by the uneven distribution of the budget based on the priorities Scale to do and put forward in doing development that can reduce poverty. To narrow the focus area of research the author of this study only look at poverty in Jawa Barat province alone in particular based on survey data BPS period of 2012. The method used in this research is the method of research policy (Policy Research). This policy research method begins because of the problems, and these problems are generally owned by the administrators / managers or decision makers in an organization. Results from this study can be seen that the factors causing poverty were a lot apart from cultural diversity contribute the causes of poverty in addition, the government also plays a role in widening poverty one of the causes is the distribution of budget allocations that are less targeted or in this case the distribution is not This uniform will also cause poverty. Therefore demanded transparency in the distribution of budget allocations in addition to the need for a scale of priorities which areas should receive funds larger budget than the other areas this is determined by the level of importance of programs to be carried.

**Keyword** : Distribution Of budget Allocation, Poverty

**Abstrak**-Kemiskinan merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditanggulangi supaya efek kemiskinan ini tidak menimbulkan masalah yang makin kompleks lagi. Banyak sekali program atau kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah guna menanggulangi permasalahan kemiskinan, namun hanya pemerintahan yang memiliki konsep yang matang dan didukung oleh sumber dana yang besar saja yang kiranya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Selain itu kemiskinan dapat ditanggulangi dengan adanya Distribusi anggaran yang merata didasarkan pada skala prioritas yang harus dilakukan dan dikedepankan dalam melakukan pembangunan yang dapat mengurangi kemiskinan. Untuk mempersempit area penelitian penulis memfokuskan penelitian ini hanya melihat kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa barat saja pada Khususnya berdasarkan data survei BPS periode 2012. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kebijakan (Policy Research). Metode penelitian kebijakan ini dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil keputusan pada suatu organisasi. Hasil dari penelitian ini dapat dilihat bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan itu banyak sekali selain dari ragam budaya yang menjadi penyumbang penyebab kemiskinan selain itu pemerintah juga berperan dalam memperlebar jurang kemiskinan salah satu penyebab adalah distribusi alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran atau dalam hal ini pendistribusian tidak merata ini juga akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Oleh sebab itu dituntut adanya transparansi dalam pendistribusian alokasi anggaran selain itu harus adanya skala Prioritas daerah mana yang harusnya mendapat dana anggaran yang lebih besar disbanding daerah lainnya hal ini ditentukan oleh tingkat kepentingan dari program-program yang akan dilakukan.

**Kata Kunci :** Distribusi Anggaran, Ketidakmerataan Anggaran, Kemiskinan

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan dimasyarakat memang merupakan sebuah hal yang paling ditakutkan oleh setiap pemerintah di setiap negara di dunia ini, karena apabila didalam sebuah negara masih ditemukan rakyatnya yang masih miskin maka pekerjaan rumah dari pemerintah tersebut akan semakin kompleks. Kompleksitas masalah kemiskinan itu akan mengakibatkan efek domino yang akan semakin mengganggu fokus pekerjaan pemerintah itu sendiri karena Masalah Kemiskinan yang terjadi di masyarakat akan menyebabkan seluruh tatanan pemerintahan terganggu hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan masalah yang sangat fundamental yang harus segera diselesaikan oleh setiap pemerintahan di negara manapun.

Salah satu cara yang banyak digunakan oleh pemerintah negara dimanapun dalam mengatasi kemiskinan di negaranya adalah dengan memberikan perhatian khusus dalam upaya menanggulangi masalah ini yaitu dengan mengalokasikan sejumlah dana pada pospos yang dapat digunakan sebagai dana untuk membiayai program atau kebijakan yang dapat menanggulangi masalah kemiskinan tersebut. Di indonesia sendiri Menurut hasil survei BPS penduduk miskin pada wilayah perkotaan dan pedesaan di indonesia secara keseluruhan pada tahun 2008 berjumlah 34.963 juta jiwa atau sekitar 15,42% dari jumlah penduduk Indonesia sedangkan tahun 2009 penduduk miskin berjumlah 32.530 juta jiwa atau sekitar 14,15% dari jumlah penduduk Indonesia sementara itu Jumlah penduduk Miskin pada tahun 2010 berjumlah 31.023 juta jiwa atau sekitar 13,33% dari jumlah penduduk Indonesia. Adapun jumlah penduduk miskin pada tahun 2011 berjumlah 30.018 juta jiwa atau sekitar 12,49% dari jumlah penduduk Indonesia sedangkan hasil survei BPS pada tahun 2012 penduduk miskin berjumlah

29.132 juta jiwa atau sekitar 11,96% dari jumlah penduduk Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survei BPS tersebut memang dari tahun ketahun Pemerintah mampu menurunkan jumlah penduduk miskin walaupun hasilnya tidak terlalu signifikan karena penurunan penduduk miskin di Indonesia hanya turun berkisar  $\pm 1\%$  saja, padahal pastinya penurunan itu bukan berarti jumlah penduduk miskin yang berkurang namun penurunan tersebut juga disebabkan karena jumlah penduduk yang semakin bertambah.

Dari pememparan data diatas penulis tertarik untuk meriset faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan terutama yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Data yang penulis gunakan dalam riset ini adalah data yang dirilease oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kebijakan (*Policy Reserch*). Menurut Sugiyono (2008:8) Metode penelitian kebijakan ini dimulai karena adanya masalah, dan masalah ini pada umumnya dimiliki oleh para administrator/manajer atau para pengambil keputusan pada suatu organisasi. Sedangkan menurut Majchrzak (1984) dalam Menurut Sugiyono (2008:8) mendefinisikan *Policy Resaserch* adalah suatu proses penelitian yang dilakukan pada, atau analisa terhadap masalah-masalah social yang mendasar, sehinggatemuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dalam menyelesaikan masalah.

## **PEMBAHASAN**

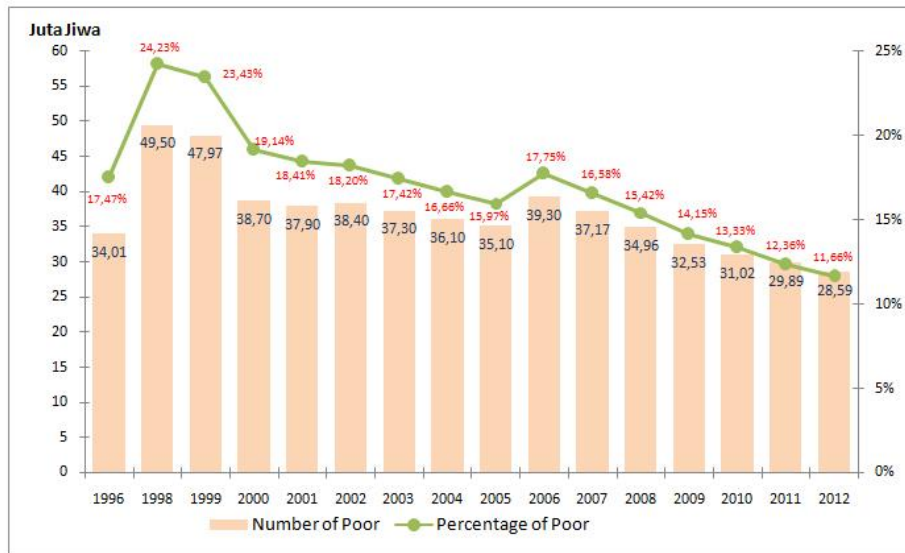
Pembangunan disetiap daerah mutlak dilakukan karena hal ini merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas

dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat di daerah lainnya. Sebuah pembangunan akan berhasil apabila didukung oleh ketersediaan modal dalam hal ini pendapatan dari sebuah daerah yang mampu membiayai pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pada kenyataannya pembangunan di setiap daerah tidak akan pernah seragam satu sama lain hal ini disebabkan karena pada setiap daerah memiliki

kemampuannya masing-masing dalam hal melakukan pembangunan. Kemampuan pembangunan disetiap daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya jumlah penduduk daerah tersebut, Sumber daya alam yang dimiliki karena hal ini dapat mempengaruhi besarnya Pendapatan asli Daerah dari daerah tersebut banyak tidaknya jumlah penduduk miskin pada daerah itu hal ini sangat berpengaruh pada arah kebijakan pembangunan nantinya. Berikut penulis sajikan data jumlah persentase penduduk miskin di Indonesia periode (1996-2012) berdasarkan data dari BPS

**Grafik I : Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012)**



Sumber: BPS\* Hingga Bulan September 2012

Gambar 1

Grafik Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (1996-2012)

Bila dicermati tingkat percepatan penurunannya, maka tampak dalam Tabel II: Persebaran dan Perubahan Angka Kemiskinan di Indonesia (1996-2002) bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 2007-2009 berkurang di atas 2 juta jiwa setiap tahunnya (atau di atas 1% per tahun). Namun demikian pada periode 2010-2012 tingkat penurunan jumlah penduduk miskin

berkurang menjadi antara 1,1-1,5 juta jiwa per tahun (atau berkisar 0,7-0,9% per tahun). Permasalahan kemiskinan di Indonesia dibayang-bayangi pula dengan keberadaan kelompok masyarakat “Hampir Miskin” yang berada pada tingkatan sedikit di atas garis kemiskinan dan sangat rentan untuk sewaktu-waktu masuk menjadi kelompok miskin apabila terjadi tekanan

eksternal, seperti kenaikan harga bahan pokok, kenaikan harga BBM dan listrik, .Sementara itu berdasarkan penyebarannya jumlah penduduk miskin berdasarkan data penyebarannya

pemutusan hubungan kerja (PHK), konflik sosial maupun bencana alam perprovinsi periode 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

**Tabel 1**  
**Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, September 2012**

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Aceh	165,40	711,10	876,60	12,47	20,97	18,58
Sumatera Utara	669,40	709,10	1 378,40	10,28	10,53	10,41
Sumatera Barat	124,30	273,60	397,90	6,45	8,99	8,00
Riau	156,40	324,90	481,30	6,68	8,94	8,05
Jambi	105,30	164,70	270,10	10,53	7,29	8,28
Sumatera Selatan	367,60	674,40	1 042,00	13,29	13,58	13,48
Bengkulu	92,70	217,80	310,50	16,89	17,80	17,51
Lampung	237,90	981,10	1 219,00	11,88	16,96	15,65
Bangka Belitung	24,00	46,20	70,20	3,73	6,96	5,37
Kepulauan Riau	106,60	24,60	131,20	6,77	7,08	6,83
DKI Jakarta	366,80	-	366,80	3,70	0,00	3,70
Jawa Barat	560,00	861,50	4 421,50	8,71	12,13	9,89
Jawa Tengah	946,50	916,90	4 863,40	13,11	16,55	14,98
DI Yogyakarta	306,50	255,60	562,10	13,10	21,29	15,88
Jawa Timur	606,00	354,60	4 960,50	8,90	16,88	13,08
Banten	333,50	314,80	648,30	4,41	8,31	5,71
Bali	93,20	67,70	161,00	3,81	4,17	3,95
Nusa Tenggara Barat	415,40	412,90	828,30	21,65	15,41	18,02
Nusa Tenggara Timur	117,40	882,90	1 000,30	12,21	22,41	20,41
Kalimantan Barat	74,20	281,50	355,70	5,49	9,04	7,96
Kalimantan Tengah	32,30	109,60	141,90	4,21	7,19	6,19
Kalimantan selatan	56,50	132,70	189,20	3,56	6,07	5,01
Kalimantan Timur	91,50	154,60	246,10	3,82	10,56	6,38
Sulawesi Utara	66,80	110,70	177,50	6,36	8,69	7,64
Sulawesi Tengah	60,20	349,40	409,60	9,02	16,85	14,94

Lanjutan Tabel 1  
 Persentase Penduduk Miskin menurut Provinsi, September 2012

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%) Propinsi		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
Sulawesi Selatan	133,60	672,30	805,90	4,44	12,93	9,82
Sulawesi Tenggara	29,60	274,70	304,30	4,62	16,24	13,06
Gorontalo	17,80	169,90	187,70	4,80	23,63	17,22
Sulawesi Barat	29,10	131,50	160,60	10,03	13,92	13,01
Maluku	51,10	287,80	338,90	8,39	28,12	20,76
Maluku Utara	8,70	79,60	88,30	2,92	9,98	8,06
Papua Barat	13,30	210,00	223,20	5,36	36,33	27,04
Papua	48,10	928,30	976,40	5,81	39,39	30,66
	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>28</b>			
<b>Indonesia</b>	<b>507,80</b>	<b>086,90</b>	<b>594,60</b>	<b>8,60</b>	<b>14,70</b>	<b>11,66</b>

Sumber: Diolah  
 dari Susenas  
 Maret 2012

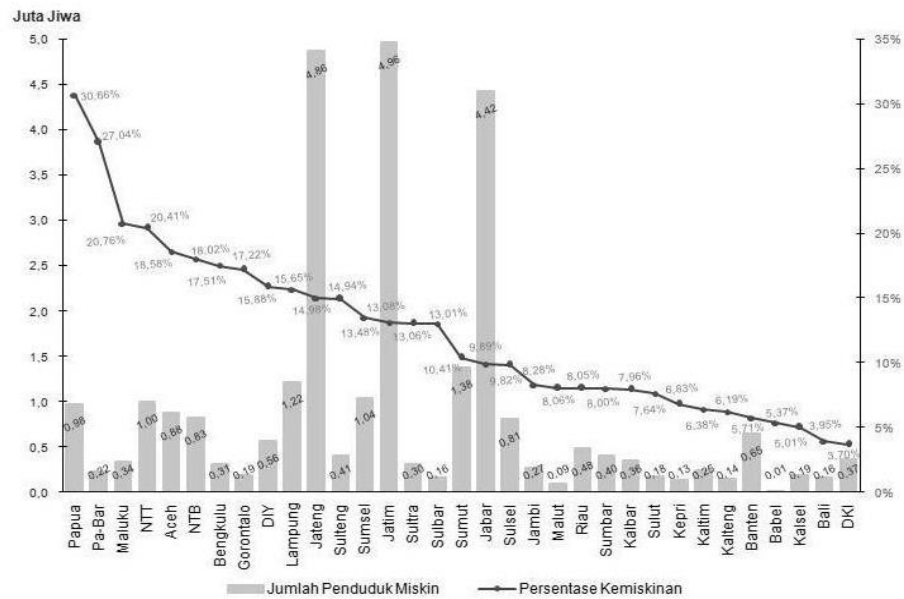
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin apabila dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin terhadap populasi penduduk di masing-masing provinsi, maka terdapat 16 Provinsi yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas prosentase nasional (11,66%), dimana Provinsi yang memiliki prosentase kemiskinan

Tertinggi adalah Papua (30,66%), Papua Barat (27,02%), Maluku (20,76%), NTT (20,41%), Aceh (18,58%) dan NTB (18,02%). Di sisi lain Provinsi yang memiliki prosentase kemiskinan terendah adalah DKI Jakarta (3,70%), Bali (3,95%), Kalimantan Selatan (5,01%), Bangka Belitung (5,37%) dan Banten (5,71%). Melihat bervariasinya tingkat dan jumlah kemiskinan pada

masing-masing Provinsi, maka diperlukan program pengentasan kemiskinan yang dapat menjangkau provinsi-provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya agar dapat partisipasi aktif dalam upaya mensukseskan program pengentasan kemiskinan hal ini dapat ditunjukkan melalui peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk mempertajam program dan target penerima sasaran melalui Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang mencakup inisiatif dan kearifan lokal.

Apabila dilihat lebih jelas dapat penulis sajikan grafik penyebaran jumlah penduduk miskin pada Provinsi berdasarkan survei BPS sampai dengan September 2012 sebagai berikut :

Grafik II : Persebaran Kemiskinan berdasarkan Provinsi (2012)



Sumber: BPS (diolah) \* Hingga Bulan September 2012

Gambar 2  
Grafik Persebaran Kemiskinan Berdasarkan Provinsi (2012)

Berdasarkan data diatas walupun memang Provinsi Jawa barat tidak termasuk kedalam provinsi yang paling banyak penduduk miskinnya namun perlu kita ketahui bahwa Jawa Barat memiliki luas total sekitar 4,4 juta hektar, merupakan wilayah agraris yang berkontribusi dalam memasok kebutuhan pangan di Indonesia hingga negara lain di dunia. Sumber-sumber agraria merupakan penopang dan kekuatan utama ekonomi Jawa Barat. Sebagai wilayah yang memiliki kekuatan agraris, keberadaan petani, buruh tani serta nelayan di perdesaan merupakan kekuatan utama dalam mendukung kehidupan dan keberlanjutan kehidupan rakyat Jawa Barat dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Ironisnya, meskipun di wilayah agraris, kemiskinan petani, buruh tani dan nelayan di wilayah perdesaan di Jawa Barat masih dialami secara nyata dan belum tertangani dengan baik. Sekitar 11 juta orang atau 25% dari total penduduk Jawa Barat masih berada dalam garis kemiskinan. Sekitar 80% rakyat miskin berada di wilayah

perdesaan, padahal wilayah perdesaan merupakan kekuatan nyata ekonomi negara.

Ada beberapa permasalahan pokok penyebab kemiskinan di perdesaan diantaranya pertama, ketimpangan penguasaan dan pengelolaan sumber agraria termasuk rendahnya aset dan akses rakyat (petani dan buruh tani) terhadap lahan tani sebagai sumber kehidupan. Dari sisi aset, rata-rata penguasaan lahan tanah di Jawa Barat hanya 0,2-0,3 ha/kk. Bahkan sebagian besar petani yang berada di sekitar kawasan kehutanan dan perkebunan belum bisa mengelola dengan jaminan perlindungan yang kuat dari negara. Dari sisi akses, petani belum memiliki akses memadai atas modal, teknologi, sarana dan infrastruktur yang mendukung pertanian baik di kawasan maupun luar kawasan negara.

Dominasi penguasaan dan pengelolaan lahan di kawasan kehutanan dan perkebunan yang dikelola perusahaan negara seperti PTPN VIII, Perum Perhutani, Perusahaan Swasta lainnya telah ikut andil menghilangkan akses rakyat tani terhadap lahan. Di Jawa

Barat, di luar kawasan hutan konservasi dan lindung, ada sekitar 684.423 Ha kawasan hutan dikuasai Perum Perhutani. Sekitar 217.380,58 hektar kawasan perkebunan di 197 lokasi Perkebunan dikuasai oleh 137 Badan Usaha Perkebunan di antaranya Perkebunan Besar Negara (PTPN VIII); Perkebunan Swasta Nasional (129 perusahaan); Perkebunan Swasta Asing (4 perusahaan); Perkebunan Besar BUMD dan Perkebunan Koperasi (2 koperasi). Padahal, sekitar puluhan ribu hektar lahan tanah di kawasan kehutanan dan perkebunan banyak yang ditelantarkan dan dibiarkan. Sementara, para petani yang berjuang untuk mendapatkan lahan garapan kemudian disengketakan dan dikriminalisasi bahkan berujung tahanan penjara dan kematian. Kedua, konversi lahan pertanian pun semakin meluas di kawasan pertanian, kehutanan dan perkebunan oleh aktivitas pembangunan seperti pertambangan, pembuatan jalan

tol, bandara, waduk, pabrik-industri dan infrastruktur fisik lainnya. Kegiatan pembangunan fisik dan pertambangan dipastikan akan berdampak pada hilangnya akses rakyat tani pada lahan taninya. Ketiga, permasalahan kualitas lahan pertanian yang semakin rusak oleh pencemaran limbah industri dan hilangnya produktifitas lahan akibat bencana kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. Di tahun 2012 saja, ratusan ribu Ha lahan pertanian sawah dan ladang terancam gagal panen. Keempat, rendahnya jaminan perlindungan dan keamanan sosial bagi para petani, buruh tani, nelayan serta rendahnya jaminan perlindungan ekologis bagi lahan pertanian produktif.

Apabila dilihat dari penerimaan PDRB yang didapat oleh Provinsi Jawa Barat sebenarnya PDRB yang didapat cukup besar hal ini dapat dilihat dari jumlah PDRB Jawa Barat periode 2011. Berikut adalah data PDRB Jawa Barat

Tabel 2  
Jumlah Penerimaan PDRB Jawa Barat Per 2008-2011  
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA BARAT  
MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 S.D 2011

LAPANGAN USAHA	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga Konstan 2000			
	2008	2009	2010*	2011**	2008	2009	2010*	2011**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>1. PERTANIAN</b>	<b>72.517.608</b>	<b>85.149.263</b>	<b>97.194.393</b>	<b>103.131.444</b>	<b>37.139.985</b>	<b>41.722.076</b>	<b>42.137.486</b>	<b>42.101.055</b>
a. Tanaman Bahan Makanan	51.899.930	60.571.646	71.150.089	75.707.280	27.508.410	31.607.820	31.947.247	31.764.028
b. Tanaman Perkebunan	4.338.444	4.942.298	5.725.375	6.127.547	2.081.761	2.258.606	2.163.253	2.255.301
c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	9.851.784	11.902.686	11.985.226	12.130.634	5.326.503	5.457.797	5.555.841	5.532.920
d. Kehutanan	910.613	798.531	921.610	944.341	425.915	359.747	377.535	364.606
e. Perikanan	5.516.837	6.934.102	7.412.093	8.221.642	1.797.396	2.038.104	2.093.610	2.184.199
<b>2. PERTAMBANGAN &amp; PENGGALIAN</b>	<b>14.904.132</b>	<b>13.278.186</b>	<b>15.546.259</b>	<b>17.362.819</b>	<b>6.850.433</b>	<b>7.424.424</b>	<b>7.464.691</b>	<b>7.084.737</b>
a. Minyak dan Gas Bumi	13.091.467	10.976.601	13.069.390	14.613.699	6.260.864	6.817.446	6.859.507	6.445.031
b. Pertambangan Bukan Migas	401.551	672.822	816.539	855.929	143.986	149.281	159.798	156.074
c. Pengalihan	1.411.114	1.628.764	1.660.329	1.893.190	445.582	457.697	445.386	483.632
<b>3. INDUSTRI PENGOLAHAN</b>	<b>276.714.347</b>	<b>281.275.082</b>	<b>291.688.080</b>	<b>319.983.632</b>	<b>133.756.556</b>	<b>131.432.865</b>	<b>135.594.749</b>	<b>144.010.048</b>
a. Industri Migas	23.274.950	20.824.130	19.934.065	22.306.371	2.199.674	2.263.413	2.173.797	2.209.100
b. Industri Bukan Migas	253.439.396	260.450.952	271.754.015	297.677.262	131.556.883	129.169.451	133.420.952	141.800.949
1. Makanan, Minuman dan Tembakau	26.349.967	30.251.876	31.200.510	34.446.158	13.802.270	14.593.465	14.403.750	15.491.627
2. Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki	64.043.302	65.340.911	64.149.158	71.185.561	27.420.706	26.301.088	24.801.926	25.952.077
3. Brg. Kayu & Hasil Hutan lainnya	2.702.432	3.260.144	3.178.660	3.209.067	1.589.552	1.818.574	1.594.763	1.529.523
4. Kertas dan Barang Cetakan	4.213.112	4.559.999	5.861.651	6.413.678	2.715.707	2.856.222	3.454.333	3.650.254
5. Pupuk, Kimia & Brg.	20.733.769	22.959.640	20.696.983	22.743.870	11.561.363	11.666.430	10.411.861	11.210.065

Lanjutan Tabel 2  
 Jumlah Penerimaan PDRB Jawa Barat Per 2008-2011  
 PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA BARAT  
 MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2008 S.D 2011

LAPANGAN USAHA	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga Konstan 2000			
	2008	2009	2010*)	2011**)	2008	2009	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6. Semen & Brg. Galian bukan logam	5.502.076	6.016.821	6.564.956	7.307.975	2.267.876	2.320.724	2.467.821	2.577.958
7. Logam Dasar Besi & Baja	1.513.724	1.571.912	1.558.641	1.757.783	627.487	632.738	604.280	640.261
8. Alat Angk., Mesin & Peralatannya	124.181.428	121.767.538	134.569.005	145.815.004	68.845.127	65.985.510	73.226.101	77.928.237
9. Barang lainnya	4.199.587	4.722.111	3.974.450	4.798.166	2.726.796	2.994.700	2.456.117	2.820.947
<b>4. LISTRIK, GAS &amp; AIR BERSIH</b>	<b>16.913.616</b>	<b>19.549.186</b>	<b>21.294.460</b>	<b>21.943.285</b>	<b>5.985.767</b>	<b>6.839.237</b>	<b>7.315.960</b>	<b>7.426.138</b>
a. Listrik	14.720.159	16.068.023	17.894.239	18.635.836	5.004.130	5.445.680	5.934.113	6.080.863
b. Gas Kota	1.586.240	2.870.806	2.727.438	2.586.047	592.293	995.675	945.182	883.911
c. Air Bersih	607.217	610.357	672.784	721.402	389.344	397.882	436.664	461.365
<b>5. BANGUNAN/KONSTRUKSI</b>	<b>21.596.583</b>	<b>24.233.185</b>	<b>29.047.786</b>	<b>34.358.935</b>	<b>9.730.820</b>	<b>10.299.411</b>	<b>11.810.047</b>	<b>13.482.716</b>
<b>6. PERDAG., HOTEL &amp; RESTORAN</b>	<b>129.912.046</b>	<b>149.056.003</b>	<b>172.713.197</b>	<b>194.431.786</b>	<b>56.937.923</b>	<b>62.701.714</b>	<b>70.083.413</b>	<b>75.770.236</b>
a. Perdagangan Besar & Eceran	113.858.133	130.960.630	151.607.164	171.072.946	49.364.029	54.889.405	61.430.810	66.662.902
b. Hotel	2.517.054	2.874.728	3.708.540	3.383.446	1.280.249	1.418.424	1.703.579	1.515.391
c. Restoran	13.536.858	15.220.645	17.397.493	19.975.394	6.293.645	6.393.886	6.949.024	7.591.943
<b>7. PENGANGKUTAN &amp; KOMUNIKASI</b>	<b>36.401.476</b>	<b>41.820.990</b>	<b>54.635.684</b>	<b>66.336.491</b>	<b>12.233.940</b>	<b>13.209.254</b>	<b>15.352.858</b>	<b>17.645.145</b>
1. Angkutan Rel	407.833	399.282	507.022	552.500	220.874	218.097	261.212	274.656
2. Angkutan Jalan Raya	28.334.976	32.788.225	42.519.544	52.606.886	6.309.319	6.815.776	7.136.940	8.058.642
3. Angkutan Laut	230.912	157.240	168.981	178.865	104.066	66.830	67.526	69.015
4. Angk. Sungai, Danau & Penyeberangan	1.364	1.624	1.299	1.316	824	938	706	695
5. Angkutan Udara	1.134.418	1.702.487	3.050.840	2.744.920	596.314	664.652	1.118.547	971.190
6. Jasa Penunjang Angkutan	1.164.771	1.225.979	1.466.914	1.730.208	518.987	540.837	631.391	734.063
b. Komunikasi	5.127.201	5.546.155	6.921.083	8.521.797	4.483.556	4.902.124	6.136.535	7.536.884
<b>8. KEU. REAL ESTAT, &amp; JASA PERUSAHAAN</b>	<b>17.228.057</b>	<b>18.802.857</b>	<b>21.155.315</b>	<b>24.479.916</b>	<b>9.075.520</b>	<b>9.618.612</b>	<b>10.564.691</b>	<b>11.985.429</b>
a. Bank	6.673.472	7.448.601	8.373.781	9.981.877	2.999.318	3.243.513	3.600.186	4.202.038
b. Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.749.858	3.001.896	3.100.726	3.460.731	1.170.703	1.239.814	1.264.641	1.380.031
c. Real Estat	5.735.833	6.006.310	7.101.959	8.065.723	3.592.211	3.682.527	4.120.982	4.604.666
d. Jasa Perusahaan	2.068.893	2.346.051	2.578.850	2.971.585	1.313.288	1.452.757	1.578.881	1.798.694
<b>9. JASA-JASA</b>	<b>47.095.619</b>	<b>56.686.561</b>	<b>68.318.686</b>	<b>78.978.039</b>	<b>19.494.893</b>	<b>20.157.658</b>	<b>21.899.922</b>	<b>23.605.740</b>
a. Pemerintahan Umum	29.509.863	36.993.208	44.320.633	50.473.752	10.356.984	10.588.266	10.687.055	10.754.676
b. Swasta	17.585.756	19.693.353	23.998.053	28.504.287	9.137.910	9.569.392	11.212.867	12.851.064
1. Sosial Masyarakat	3.192.309	3.520.763	3.868.990	4.375.858	1.597.829	1.612.424	1.791.971	1.954.665
2. Hiburan & Rekreasi	374.985	449.728	528.218	631.713	252.968	279.808	317.655	366.710
3. Perorangan & Rumah tangga	14.018.462	15.722.862	19.600.845	23.498.716	7.287.113	7.677.160	9.103.241	10.529.689
<b>PDRB</b>	<b>633.283.483</b>	<b>689.841.314</b>	<b>771.593.860</b>	<b>861.006.348</b>	<b>291.205.837</b>	<b>303.405.251</b>	<b>322.223.817</b>	<b>343.111.243</b>
<b>PDRB TANPA MIGAS</b>	<b>596.917.066</b>	<b>658.040.584</b>	<b>738.590.405</b>	<b>824.086.278</b>	<b>282.745.299</b>	<b>294.324.392</b>	<b>313.190.513</b>	<b>334.457.113</b>

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat  
 Catatan: \*) Angka Perbaikan

Selain itu penulis coba tampilkan data PDRB berdasarkan hasil Survei BPS periode 2008 sampai dengan 2011

berdasarkan data penerimaan Per Kabupaten/kota se Jawa Barat sebagai berikut:



Tabel 3  
Jumlah Penerimaan PDRB per Kabupaten/Kota Jawa Barat Per 2008-2011  
PDRB JAWA BARAT ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2008 S.D 2011 (Termasuk Minyak dan Gas Bumi)

No.	Kabupaten/Ko	200	200	2010*)	2011**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kab. Bogor	58.389.41	66.083.78	73.800.70	83.032.46
2	Kab.	16.133.20	17.264.68	18.595.07	20.160.89
3	Kab. Cianjur	15.496.97	16.737.74	18.435.75	20.573.04
4	Kab. Bandung	38.282.16	41.262.09	46.092.23	51.291.76
5	Kab. Garut	20.360.83	22.271.42	24.844.61	27.491.63
6	Kab.	10.474.02	11.914.00	12.771.90	13.931.81
7	Kab. Ciamis	14.501.90	15.841.18	17.572.44	19.344.95
8	Kab.	7.047.92	8.179.32	9.131.57	10.018.85
9	Kab. Cirebon	15.564.71	17.118.74	19.170.30	20.982.83
10	Kab.	8.297.70	8.994.42	10.157.41	10.994.06
11	Kab.	10.300.94	11.188.16	12.265.68	13.531.77
12	Kab.	41.528.32	41.956.48	46.409.61	53.044.75
13	Kab. Subang	13.541.81	14.767.39	15.894.71	17.120.52
14	Kab.	13.215.85	14.156.38	15.957.02	17.495.51
15	Kab.	42.445.65	48.283.35	57.260.09	63.617.11
16	Kab. Bekasi	82.977.55	89.735.79	97.526.72	106.773.28
17	Kab. Bandung	14.486.95	15.847.97	17.543.64	19.354.91
18	Kota Bogor	10.089.94	11.904.60	13.908.90	15.487.43
19	Kota	3.697.95	4.394.80	5.175.32	5.921.02
20	Kota Bandung	60.444.48	70.281.16	82.002.17	95.612.86
21	Kota Cirebon	8.933.93	9.877.19	10.931.43	12.117.05
22	Kota Bekasi	29.525.36	31.475.38	35.679.06	40.528.80
	Kota Depok	12.542.49	14.063.91	16.144.72	17.913.31
	Kota Cimahi	10.716.29	11.683.70	12.845.60	14.164.83
	Kota	7.150.92	7.769.68	8.469.03	9.274.75
	Kota Banjar	1.433.56	1.592.87	1.769.53	1.948.59
	<b>Jumlah 26</b>	<b>567.580.916</b>	<b>624.646.306</b>	<b>700.355.335</b>	<b>781.728.871</b>
	<b>Jawa Barat</b>	<b>633.283.48</b>	<b>689.841.31</b>	<b>771.593.86</b>	<b>861.006.34</b>

Sumber: BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi Jawa Barat

Catatan: \*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka Sementara

Dari data diatas dapat dilihat pada dasarnya jumlah PDRB yang didapat kota/kabupaten di Jawa barat cukup besar, Selain itu jumlah PDRB suatu daerah akan mempengaruhi jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari daerah yang bersangkutan. Apabila dilihat dari jumlah Pendapatan asli Daerah (PAD) Jawa Barat rasanya menjadi sesuatu yang kurang pantas apabila Jawa Barat masih memiliki jumlah penduduk miskinnya. berikut penulis sajikan grafik jumlah PAD Jawa Barat kurun 2008-2012 berdasarkan survei BPS. Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2008-2012 REKAPITULASI REALISASI PAD PEMERINTAH DI JAWA BARAT TAHUN 2008-2012 (RIBU RUPIAH) Rekapitulation Original Local Government Revenue In West Jawa 2008-2012 (Thousand Rupiahs)

<i>Regency/City</i>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>2012 *)</b>
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1 Kabupaten Bogor	307.634.448,	337.903.884,	399.263.957,	685.121.399,	794.740.467,
2 Kabupaten Sukabumi	87.402.425,0	80.616.079,0	98.439.617,0	151.825.718,	163.476.799,
3 Kabupaten Cianjur	77.905.507,0	93.628.876,0	114.305.536,	154.209.665,	83.150.777,9
4 Kabupaten Bandung	144.660.409,	152.549.656,	198.650.518,	291.079.862,	275.027.033,
5 Kabupaten Garut	83.306.424,0	102.702.673,	108.914.764,	122.418.643,	145.498.076,
6 Kabupaten Tasikmalaya	48.978.173,0	49.657.867,0	48.321.760,0	55.771.204,7	50.458.726,
7 Kabupaten Ciamis	46.847.498,0	51.276.556,0	50.512.876,0	58.467.315,0	66.336.000,
8 Kabupaten Kuningan	42.825.181,0	63.573.539,0	68.158.690,0	82.917.043,0	88.197.728,
9 Kabupaten Cirebon	101.512.670,	116.095.438,	139.426.725,	193.843.222,	209.126.838,
10 Kabupaten Majalengka	47.721.941,0	68.121.599,0	76.398.018,0	86.579.536,4	91.705.264,
11 Kabupaten Sumedang	87.633.521,0	90.819.326,0	108.646.804,	139.823.277,	141.047.465,
12 Kabupaten Indramayu	56.770.812,0	86.408.587,0	99.439.223,0	144.553.804,	109.610.708,
13 Kabupaten Subang	64.034.543,0	67.665.305,0	130.968.161,	94.181.847,0	95.933.420,0
14 Kabupaten Purwakarta	59.429.025,0	64.044.768,0	76.489.287,0	111.271.086,	146.192.512,
15 Kabupaten Karawang	131.785.039,	130.020.658,	186.949.235,	378.630.051,	273.225.186,
16 Kabupaten Bekasi	249.063.807,	287.299.507,	258.671.098,	599.070.130,	492.295.240,
17 Kabupaten Bandung Barat	33.617.474,0	39.964.364,0	50.268.420,0	94.606.169,0	88.680.283,8
18 Kota Bogor	97.768.135,0	125.313.316,	134.739.596,	230.449.644,	211.013.607,
19 Kota Sukabumi	65.263.021,0	66.190.681,0	91.472.357,0	115.351.808,	117.584.284,
20 Kota Bandung	314.627.155,	360.152.627,	441.871.142,	834.505.864,	755.459.217,
21 Kota Cirebon	67.692.578,0	77.318.390,0	90.795.674,5	120.130.531,	140.537.939,
22 Kota Bekasi	189.492.859,	231.694.925,	296.046.879,	568.344.299,	557.902.282,
23 Kota Depok	112.772.421,	115.720.348,	142.380.789,	282.747.544,	351.311.358,
24 Kota Cimahi	64.964.961,0	75.037.372,0	87.321.280,0	116.677.729,	110.095.909,
25 Kota Tasikmalaya	63.849.141,0	76.503.523,0	104.773.656,	110.369.865,	172.400.065,
26 Kota Banjar	23.636.367,0	28.011.890,0	37.363.752,0	45.952.391,9	41.829.799,
<b>Total 26 Kabupaten/Kota</b>	<b>2.671.195.535,</b>	<b>3.038.291.754,</b>	<b>3.640.589.814,</b>	<b>5.868.899.656,</b>	<b>5.772.836.990,</b>
<b>Provinsi Jawa Barat</b>	<b>5.275.051.504,</b>	<b>5.577.588.779,</b>	<b>7.252.242.913,</b>	<b>8.502.643.155,</b>	<b>8.176.352.694,</b>
	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>49</b>	<b>29</b>

\* *Data APBD*

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa PAD Jawa Barat termasuk Provinsi dengan PAD yang cukup tinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lain selain itu apabila melihat data yang dirilis oleh DIPENDA Jawa barat melalui situs resminya menggambarkan

bahwa pada terjadi surplus sebesar 7,260 Milyar Rupiah maka hal ini memnggambarkan hal yang tidak mungkin apabila di Jawa Barat masih ditemukannya penduduk Miskin. Berikut penulis sajikan data sebagai berikut

Tabel 5  
Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2008-2012

RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA-SKPD
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2012		
Urusan Pemerintahan : 1.20 URUSAN WAJIB Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandiran		
Organisasi : 1.20.05 Dinas Pendapatan Daerah		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.653.241.155.600,00
4 1 1	Pajak Daerah	7.588.458.000.000,00
4 1 2	Retribusi Daerah	61.200.000,00
4 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	66.723.955.600,00
JUMLAH PENDAPATAN		7.653.241.155.600,00
5	BELANJA	
5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	276.739.309.108,00
5 1 1	Belanja Pegawai	276.739.309.108,00
5 2	BELANJA LANGSUNG	116.490.036.985,50
5 2 1	Belanja Pegawai	1.272.759.000,00
5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	81.840.140.694,50
5 2 3	Belanja Modal	33.377.136.891,00
JUMLAH BELANJA		393.229.346.093,50
SURPLUS		7.260.011.810.906,50

Sumber : *Dispenda Jabar*

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadi surplus yang luar biasa pada Pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk miskin di Jawa Barat ini, untuk dapat melihat lebih jelas lagi ada kiranya kita dapat menyelusuri lebih jelas lagi upaya pemerintah provinsi Jawa

Barat dalam memberikan langkah nyata dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi diwilayahnya melalui penggambaran rencana belanja daerah pada periode tahun 2012 adapun data rencana belanja daerah provinsi Jabar dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 6  
Pendapatan Asli Daerah Jawa Barat Tahun 2008-2012

No.	URAIAN APBD	TAHUN ANGGARAN						
		2009	2010	%	2011	%	2012	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	BELANJA DAERAH	8.262.578.445.826,00	9.560.556.639.525,54	15,71	8.473.804.796.529,00	(11,367)	9.207.277.276.223,00	8,66
1.	Belanja Tidak Langsung	5.388.574.793.783,75	6.468.835.330.447,54	0,20	5.410.880.600.419,00	(16,35)	6.445.094.093.356,00	19,11
a.	Belanja Pegawai	1.083.681.567.815,00	1.628.776.576.249,54	0,50				
b.	Belanja Bunga	-	-					
c.	Belanja Subsidi	16.050.000.000,00	12.195.120.550,00	(0,24)				
d.	Belanja Hibah	100.306.241.000,00	136.829.361.000,00	0,36				
e.	Belanja Bantuan Sosial	326.735.979.968,75	165.496.000.000,00	(0,49)				
f.	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemdes	1.842.907.237.500,00	1.958.495.732.648,00	0,06				
g.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemda/Pemdes	1.928.893.767.500,00	2.492.042.540.000,00	0,29				
h.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000.000,00	75.000.000.000,00	-				
2.	Belanja Langsung	2.874.003.652.042,25	3.091.721.309.078,00	0,08	3.562.924.196.110,00	15,24	2.762.183.182.867,00	(22,47)
a.	Belanja Pegawai	384.125.696.850,00	249.308.422.430,00	(0,35)				
b.	Belanja Barang dan Jasa	1.566.111.018.191,00	1.710.662.535.776,40	0,09				
c.	Belanja Modal	923.766.937.001,25	1.131.750.350.871,60	0,23				

Sumber : *RKPD 2011 Provinsi Jabar*

Dari data tabel 3.3 diatas yang merupakan potongan data dari rencana kerja pemerintah daerah provinsi jawa barat tahun 2011 untuk rencana kerja real pada tahun 2012 dapat dilihat bahwa belanja daerah mencapai 8,88% dari total belanja yang meliputi dua sub pokok belanja yaitu Belanja tidak langsung yang besarnya mencapai 19,11% dimana di dalamnya terdapat

sub-sub belanja seperti belanja pegawai dan belanja bantuan sosial dimana didalam belanja bantuan sosial dalam hal ini kasus pada tahun 2010 belanja ini lebih kecil dari jumlah belanja pegawai hal ini menunjukkan bahwa jumlah perhatian Pemerintah terhadap penduduk miskin masih sangat kurang. Sekarang kita bandingkan dengan Perda APBD Jabar tahun 2013 sebagai berikut.

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	Rp 13.841.422.992.558,20
b. Belanja Langsung	Rp 3.675.229.428.406,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	Rp 1.673.209.654.391,00
b. Belanja Bunga	Rp 0,00
c. Belanja Subsidi	Rp 10.000.000.000,00
d. Belanja Hibah	Rp 5.350.065.225.090,00
e. Belanja Bantuan Sosial	Rp 25.500.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	Rp 3.205.445.313.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan	Rp 3.144.915.502.324,00
h. Belanja Tidak Terduga	Rp 432.287.297.753,20
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja Pegawai	Rp 429.191.333.282,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.053.579.857.147,00
c. Belanja Modal	Rp 1.192.458.237.977,00

Sumber : web <http://jabar.go.id>

Dalam penetapan APBD 2013 pun dapat terlihat bahwa jumlah belanja pegawai lebih besar dari pada jumlah belanja untuk bantuan sosial. Berdasarkan datadata diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya pemerintah sudah ada upaya perbaikan dalam menuntaskan kemiskinan di daerahnya namun apabila kita bandingkan dengan jumlah pendapatan yang diperoleh maka hal ini belumlah cukup sebagai realisasi program pengentasan kemiskinan karena berdasarkan data yang penulis telusuri bahwa masih ditemukanya jumlah belanja pegawai yang lebih besar daripada jumlah belanja untuk sektor bantuan sosial hal ini menunjukan adanya ketimpangan dan gemuknya birokrasi yang perlu diurus. Pada

dasarnya apabila kita melihat program-program Nasional yang digulirkan oleh pemerintah pusat memang banyak sekali program yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan program-program tersebut dijabarkan dalam sebuah kebijakan penuntasan kemiskinan dengan membagi masyarakat miskin kedalam beberapa wilayah atau klaster kemiskinan yaitu Strategi Pemerintah dalam mengurangi kemiskinan difokuskan melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: 1. Klaster Pertama: Program bantuan dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan perbaikan kualitas hidup

keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). 2. Klaster Kedua: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM Mandiri yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat melalui usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan kemandirian dengan sasaran kelompok masyarakat/kecamatan miskin. 3. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui pembagian klaster bertingkat tersebut diharapkan kelompok keluarga miskin yang awalnya menjadi penerima program klaster 1 akan dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan selanjutnya naik kelas menjadi KEPenerima program klaster 2 untuk terus memperbaiki kehidupannya hingga mampu memanfaatkan program klaster 3 dan akhirnya diharapkan dapat keluar dari jeratan masalah kemiskinan. Untuk memperkuat strategi 3 klaster tersebut, Pemerintah sejak tahun 2011 meluncurkan Klaster Keempat yang terdiri dari Program Rumah Murah, Transportasi Umum Murah, Air Bersih untuk Rakyat, Listrik Murah dan Hemat, serta Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Masyarakat Pinggir Perkotaan.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan itu banyak sekali selain dari ragam budaya yang menjadi penyumbang penyebab kemiskinan selain itu pemerintah juga berperan

dalam memperlebar jurang kemiskinan salah satu penyebab adalah distribusi alokasi anggaran yang kurang tepat sasaran atau dalam hal ini pendistribusian tidak merata ini juga akan menyebabkan terjadinya kemiskinan. Oleh sebab itu dituntut adanya transparansi dalam pendistribusian alokasi anggaran selain itu harus adanya skala Prioritas daerah mana yang harusnya mendapat dana anggaran yang lebih besar dibanding daerah lainnya hal ini ditentukan oleh tingkat kepentingan dari program-program yang akan dilakukan. Berdasarkan data diatas dapat dilihat pula bahwa kemiskinan, ditinjau dari penyebabnya dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu kemiskinan struktural, kemiskinan natural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi karena kebijakan yang tidak pro terhadap orang miskin. Pola akses terhadap sumber daya ekonomi tidak pro rakyat dan diskriminasi gender yang menyebabkan perempuan termarginalisasi secara ekonomi. Contohnya adalah kapitalisme yang memungkinkan pemilik modal mengakses kekayaan sebanyak banyaknya. Selanjutnya kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi karena faktor alam seperti tinggal di padang pasir, lahan yang tidak subur, atau tempat yang tidak mempunyai sumber daya alam yang banyak. Sedangkan kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang banyak disebabkan karena sikap mental suatu kelompok masyarakat atau individunya sendiri. Sikap hidup boros, suka menghamburhamburkan uang, malas bekerja adalah contoh yang dapat menyebabkan kemiskinan tipe ini. Dari ketiga tipe kemiskinan diatas, hampir semua kemiskinan berasal dari sumber yang sama yaitu masalah kependudukan. terutama kemiskinan struktural dan kultural. Apabila melihat pada paparan data pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan yang terjadi di Jawa barat salah satunya ditimbulkan oleh salah satu faktor pemicu yaitu distribusi anggaran yang

kurang merata dimana masih dilihat bahwa belanja pegawai masih sangat besar dibandingkan dengan bantuan langsung yang diberikan kepada rakyat miskin sehingga kemiskinan yang terjadi mengarah pada kemiskinan struktural yang diakibatkan oleh kebijakan yang kurang pro terhadap rakyat. Sedangkan kemiskinan natural yang banyak disebabkan karena masalah alam sebenarnya hampir tidak mungkin jika terjadi di Indonesia yang mempunyai kekayaan alam yang berlimpah. Namun kekayaan yang berlimpah ini akan habis jika laju penduduk sedemikian besar sehingga alokasi kekayaan alam sudah tidak cukup lagi memenuhi kebutuhan penduduk. Sedangkan untuk kemiskinan kultural, lebih tepat jika kita sebutkan adalah efek berantai dari jumlah penduduk yang tidak terkendali, disusul dengan tingkat kualitas hidup dan pendidikan yang rendah, dan akhirnya berujung pada mental dan perilaku penduduk yang “memancing” kemiskinan.

#### **REFERENSI**

Shim, Joe K dan Joel G Siegel. 2000. BUDGETING : Basic and Beyond. alih bahasa oleh Julius Riyadi dan Neneng Natalia. Yogyakarta : Andi Offset Subagio, 1991. Hukum Keuangan Negara RI. Jakarta : CV.Rajawali Suparmoko, 2000. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : BPF E Sugiyono, 2008. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Alfabeta Internet:

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) diambil pada 25 Oktober 2013

<http://kpdt.bps.go.id/index.php?Home/index> diambil pada 25 Oktober 2013 Helmi, Ruli Nizar, Menelusuri masalah pokok kemiskinan..2013

<http://jabar.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=577&ContentTypeId=0x>

01003DCABABC04B7084595DA3644 diambil pada 25 Oktober 2013

<http://jabar.go.id> diambil pada 25 oktober 2013 Chairil dan Adyawardman, 2013.Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=6804](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6804)

diambil pada 25 Oktober 2013

<http://walhijabar.wordpress.com/2012/09/> / diambil pada 25 Oktober 2013

<http://www.tnp2k.go.id/program/program/> / diambil pada 25 Oktober 2013

Badruddin, Syamsiah. 2009.

Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial Di Indonesia Pra Dan Pasca Runtuhnya Orde Baru.

<http://profsyamsiah.wordpress.com/2009/04/23/49/> diambil pada 25 Oktober

2013 Suyanto, Bagong. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

[http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=87:k](http://mkp.fisip.unair.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=87:k)

emiskinan-dan-pemberdayaanmasyarakatmiskin&catid=34:mkp&Itemid=61

diambil pada 25 Oktober

2013.